

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dimulai dari implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang belum mencapai tujuan untuk mewujudkan sekolah berbasis manajemen sekolah sebagaimana yang diharapkan, sejumlah temuan mengaitkan kinerja implementasi yang belum optimal tersebut dengan pihak-pihak terkait sebagai pendukung yang belum mampu berperan maksimal di bidangnya.

Di antaranya adalah sangat kurangnya dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), seperti warga sekolah dan komite sekolah. Dalam konteks ini pengawasan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan saat ini belum efektif dan efisien dalam memotivasi sekolah untuk melaksanakan reformasi. Akibatnya, sekolah tidak dapat melaksanakan reformasi di bidang pendidikan dan proses pendidikan di sekolah dengan baik, padahal seharusnya sekolah mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Lingkungan sekolah yang mendukung sekolah dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya belum berjalan dengan baik, sehingga target dan sasaran tidak tercapai. Hal ini dikarenakan belum semua pihak baik masyarakat, pemerintah desa, maupun orang tua siswa dapat memahami dan menghayati dunia pendidikan, apalagi apa yang menjadi visi, misi, dan tujuan sekolah. Selain itu, layanan pendidikan di sekolah belum dapat mengembangkan potensi anak secara maksimal dan belum dapat memperhatikan perbedaan individu siswa.

Mengingat berbagai masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa cara penerapan manajemen berbasis sekolah belum ideal, sehingga banyak sekolah

yang belum benar-benar menerapkannya dalam praktik. Kepemimpinan kepala sekolah masih kurang, selain itu manajemen berbasis sekolah dan komite sekolah belum berjalan dengan baik. Di setiap sekolah, keberhasilan manajemen berbasis sekolah seharusnya sangat dipengaruhi oleh peran kepemimpinan dan komite.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Indonesia dirintis oleh pemerintah, dalam hal ini setiap Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), beserta pemerintah daerah, dengan bantuan The United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), sejak tahun 1999 di 7 kabupaten pada 4 provinsi. Setelah dinyatakan berhasil pada beberapa sekolah piloting, program Manajemen Berbasis Sekolah memperoleh donor baik dalam dan luar negeri, antara lain NZAID, AUSAID, USAID, Plan International, Citibank, Save the Children, Jica, dan Kartika Soekarno Foundation.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam setiap mengelola kegiatan pendidikan hal ini tercantum dalam (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 51 Ayat 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional) yaitu pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Manajemen berbasis sekolah merupakan hasil terjemahan dari School Based Management (SBM) adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan

kepada Kepala Sekolah dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu model penyelenggaraan pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhannya melalui pemberdayaan sumber-sumber daya yang ada termasuk partisipasi masyarakat sehingga lebih mencerminkan adanya suatu upaya peningkatan pemberian pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, transparan dan akuntabel secara nyata untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efisien dan efektif tanpa mengesampingkan tujuan Pendidikan Nasional.

Manajemen Berbasis Sekolah tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Pengelolaan keuangan yang belum maksimal
2. Kurangnya sumber daya manusia dikarenakan usia guru yang memasuki usia pensiun
3. Terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai.
4. Kurangnya dukungan dari masyarakat terkait program yang dilakukan sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak dapat berjalan sendiri karena harus didukung oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Kepala sekolah dan komite sekolah dianggap paling berpengaruh dalam manajemen berbasis sekolah karena peran merupakan kunci mereka dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Kepala sekolah juga sebagai pemimpin eksekutif, bertanggung jawab untuk menerjemahkan visi dan misi sekolah ke dalam

program- program yang konkret dan terukur. Mereka juga berperan penting dalam mengelola sumber daya manusia, termasuk guru dan staf, serta dalam memastikan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Dengan kemampuannya untuk mengarahkan kebijakan dan strategi, kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi setiap perkembangan akademik dan non-akademik siswa.

Secara teoritis, manajemen berbasis sekolah merupakan suatu sistem pengelolaan persekolahan yang selalu memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada institusi sekolah untuk mengatur kehidupan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Berdasarkan visi, misi, dan serta tujuan pendidikan, sekolah menetapkan berbagai program dan kegiatan serta untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan berbagai potensi yang tersedia dan dapat digali di sekolah dan masyarakat sekitar sekolah.

Semakin tingginya kehidupan dalam sosial masyarakat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah semakin meningkatkan tuntutan kebutuhan kehidupan sosial masyarakat. Pada akhirnya tuntutan tersebut dapat bermuara kepada pendidikan, karena masyarakat selalu meyakini bahwa pendidikan mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan tersebut.

Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah sebagai institusi tempat masyarakat berharap tentang kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pendidikan perlu perubahan yang dapat dilakukan melalui perubahan dan peningkatan dalam suatu pengelolaan atau manajemen pendidikan di sekolah.

Gagasan manajemen berbasis sekolah perlu dipahami dengan baik oleh seluruh pihak yang selalu berkepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya sekolah, karena implementasi manajemen berbasis sekolah tidak hanya sekedar membawa perubahan dalam kewenangan akademik sekolah dan tatanan pengelolaan sekolah, akan tetapi membawa perubahan pula dalam pola kebijakan dan orientasi partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan Sekolah. (Rohiat, 2010:47-55).

Diberlakukannya Undang-undang No.22 tentang otonomi daerah, pada pasal 11 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Seiring dengan otonomi dan asa desentralisasi, peningkatan kualitas menuntut partisipasi dan pemberdayaan seluruh komponen pendidikan dan penerapan suatu konsep pendidikan sebagai suatu sistem. Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara lain kepala sekolah, guru, pegawai, dan serta masyarakat dalam peningkatan kualitas dan produktivitas. dari pengertian UU No. 22 bahwa manajemen berbasis sekolah (*school Based Management*) dapat diartikan adalah suatu kajian yang selalu dapat mengubah sistem pendidikan di Indonesia dari setiap sentralistik menjadi desentralistik sejak diberlakukannya

Manajemen berbasis sekolah ini akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh semua sumber daya manusia yang professional untuk mengoperasikan sekolah, dana yang cukup agar setiap sekolah mampu mengaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana prasarana yang memadai untuk

mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat (orang tua siswa) yang tinggi baik dalam hal bantuan pemikiran, maupun sumbangan dana.

Tujuan dari manajemen berbasis sekolah di atas adalah :

1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan.
2. Meningkatkan relevansi pendidikan disekolah.

Dengan adanya manajemen berbasis sekolah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari atas. Mereka dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan keadaan setempat dan dapat melaksanakan visi tersebut secara mandiri. Manajemen berbasis sekolah pada intinya adalah memberikan kewenangan terhadap sekolah untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan kualitas secara terus menerus. Dapat juga dikatakan bahwa manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu tujuan manajemen berbasis sekolah adalah untuk mewujudkan kemerdekaan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Dengan demikian peran pemerintah pusat akan berkurang. Sekolah diberi hak otonomi untuk menentukan nasibnya sendiri. Paling tidak ada tiga tujuan yang dilaksanakannya dalam manajemen berbasis sekolah peningkatan efisiensi, peningkatan mutu, dan peningkatan pemerataan pendidikan. Dengan adanya manajemen berbasis sekolah diharapkan akan memberi peluang dan kesempatan kepada kepala sekolah, guru-guru dan siswa untuk melakukan inovasi pendidikan.

Dengan adanya manajemen berbasis sekolah ini maka ada beberapa keuntungan dalam pendidikan yaitu kebijakan dan kewenangan sekolah dalam mengarah langsung kepada siswa, orang tua, guru, sumber daya yang ada agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan pembinaan peserta didik dapat dilakukan secara efektif, dapat mengajak semua pihak untuk memajukan dan meningkatkan pelaksanaan pendidikan.

Landasan hukum manajemen berbasis sekolah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang menandakan era sentralis telah berakhir dan sistem pemerintah telah berubah menjadi desentralisasi atau otonomi. Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan secara jelas bahwa penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan pada pasal 14 ayat (1) yang menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah kabupaten/kota yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, dan fungsi tugas pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan telah dijelaskan pada PP No. 38 Tahun 2007 yang isinya meliputi bidang :

1. Kebijakan
2. Pembiayaan
3. Kurikulum
4. Sarana dan prasarana
5. Pendidik dan tenaga kependidikan
6. Pengendalian mutu pendidikan.

Pembentukan Komite Sekolah telah ditetapkan dalam keputusan Mendiknas No.044/U/2002 diharapkan sasaran yang akan dicapai dalam perbaikan mutu pada program pembinaan pendidikan dasar dan menengah diantaranya agar terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat dengan mengenalkan konsep dan pemberdayaan Komite Sekolah di setiap sekolah.

Komite sekolah biasanya terdiri dari berbagai pemangku kepentingan seperti orang tua, guru, dan anggota masyarakat, memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai kebutuhan dan aspirasi komunitas sekolah. Melalui partisipasi aktif dalam perencanaan dan evaluasi, komite sekolah selalu membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan berbagai kepentingan dan kebutuhan. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif yang dapat meningkatkan dukungan dan keterlibatan dari semua pihak yang terlibat.

Kerjasama antara kepala sekolah dan komite sekolah juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam setiap manajemen sekolah. Dengan adanya mekanisme pengawasan bersama, setiap ada kebijakan dan keputusan dapat dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan feedback dan hasil yang diperoleh. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen, tetapi juga membangun kepercayaan dan komitmen dari seluruh komunitas sekolah terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Kepala sekolah dan komite sekolah mempunyai hubungan yang sangat erat sekali demi tercapainya keberhasilan pendidikan disekolah. Sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan yang selalu lebih baik di sekolah dan selalu

melibatkan keikutsertaan komite sekolah dan tidak lepas pula dengan adanya kepemimpinan kepala sekolah, dengan demikian, kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah yang baik akan dapat mewujudkan keberhasilan manajemen berbasis sekolah di sekolah.

Pemimpin pendidikan merupakan orang yang paling sangat bertanggung jawab terhadap setiap keberhasilan pendidikan di sekolahnya. Kepala sekolah berkaitan dengan kepemimpinan dalam pelaksanaan tugas dan hubungan antar manusia, maka syarat yang harus dipenuhi seseorang yang dipilih atau diangkat menjadi kepala sekolah harus mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas dan kemampuan dalam membina hubungan baik dengan semua personel sekolah (Muhroji, 2004:86).

Berkaitan dengan adanya kepemimpinan kepala sekolah dalam pendidikan meliputi proses menggerakkan, mempengaruhi, memberikan motivasi dan mengarahkan orang-orang di dalam organisasi/lembaga pendidikan terutama untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin pendidikan dalam hal ini adalah kepala sekolah dituntut untuk memiliki suatu kemampuan dalam membimbing, menggerakkan serta mendorong dan mengarahkan orang-orang yang ada dalam lembaga pendidikan, yaitu mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan sebelumnya (Arifin dan Permadi, 2007:45).

Penjelasan di atas bermakna bahwa peran kepala sekolah sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu sekolah dalam menjalankan tugas kepala sekolah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Baik atau buruk sebuah sekolah lebih

banyak ditentukan oleh kemampuan profesional kepala sekolah sebagai pengelolaannya. Fungsi kepala sekolah selain sebagai manajer, juga sebagai pemikir dan pengembang (*Brain power*) yang tugas utamanya adalah memikirkan kemampuan sekolah maka kepala sekolah dituntut untuk mampu berperan sebagai seorang pemimpin profesional. Ciri khas kepala sekolah yang profesional adalah menguasai secara baik setiap pekerjaannya melebihi rata-rata personalia lain disekolah, dan selalu memiliki komitmen moral yang tinggi atas pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesinya (Danim dan Suparno, 2009:12).

Salah satu wujud aktualisasi konsep Manajemen Berbasis Sekolah adalah dibentuklah suatu badan-badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah. Dari konsep tersebut dalam peningkatan mutu harus menyeluruh, fleksibel dan berkesinambungan. Untuk meningkatkan suatu mutu penyelenggaraan pendidikan di antaranya kebijakan pembentukan Komite Sekolah yang akhir-akhir ini menjadi agenda dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Menurut Edward sallis (2012:31) Organisasi-organisasi yang menganggap serius pencapaian mutu, menyadari sebagian besar rahasia mutu berakar dari mendengar dan merespon secara simpatik terhadap kebutuhan dan keinginan para pelanggan dan klien. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat sangat penting sebagai sumber aspirasi dan tolak ukur pencapaian mutu. Konsep ini cenderung disambut dan diapresiasi oleh semua masyarakat sebagai

sebuah angin segar dalam proses perjalanan dan penyelenggaraan lembaga pendidikan dengan lebih mengintensifkan pelibatan masyarakat hal tersebut muncul ketika pemerintah menerapkan system desentralisasi pendidikan.

Menurut Peneliti, bahwa Manajemen Berbasis Sekolah harus berkesinambungan diantara Kepala Sekolah dan serta Komite Sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah tidak akan berjalan tanpa dibantu Kepala Sekolah, Guru dan Staff serta masyarakat yang dalam hal ini Komite Sekolah.

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, serta akuntabilitas (Peraturan pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005). Pengelolaan sekolah menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, melibatkan peran serta masyarakat dan bertumpu pada kemampuan dan kebutuhan sekolah itu sendiri. Pengambilan keputusan oleh setiap pihak sekolah selalu harus mengikutsertakan orang tua dan masyarakat melalui komite sekolah.

Sebagian besar orang tua murid yang merupakan bagian dari komite sekolah, mereka beranggapan bahwa pendidikan itu sepenuhnya tanggung jawab sekolah dan pemerintah. Padahal sesungguhnya pendidikan itu diawali dan didasari dari rumah baik berupa aturan, tata tertib, tata krama, maupun norma serta tata nilai. Setelah sekolah mengalami kesulitan dalam menangani masalah pendidikan anak didik yang disebabkan oleh perbedaan dalam latar belakan sosial budaya, etnis maupun ekonomi orang tua, maka disadari bahwa perlu adanya hubungan satu sama lain untuk membicarakan hal tersebut pada tingkat berikutnya, hubungan ini bukan hanya disebabkan oleh munculnya

kesulitan seperti di atas, tetapi didorong oleh rasa ingin tahu masing-masing, baik tentang pendidikan disekolah maupun dirumah.

Dorongan rasa ingin tahu tadi meningkatkan kepada keterlibatan masing-masing bahkan sampai kepada ingin berperan serta. Peran serta ini lah yang memunculkan organisasi atau wadah yang dapat menampung aspirasi kedua pihak. Tingkat-tingkat hubungan inilah yang perlu kita dikembangkan sekolah sehingga akhirnya hakikat hubungan sekolah dengan orang tua dan masyarakat itu sampai kepada tingkat kerja sama.

Sebagai gambaran penelitian mangambil 3 SMK Negeri yang ada di Kecamatan Kayuagung, yaitu :

1. SMK Negeri 1 Kayuagung
2. SMK Negeri 2 Kayuagung
3. SMK Negeri 3 Kayuagung

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas SMK Negeri di Kecamatan Kayuagung perlu adanya penerapan atau pelaksanaan manajemen berbasis sekolah disekolah-sekolah secara efektif dan efisien maka penulis perlu melakukan sebuah penelitian dengan judul **“PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN PERAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP KEBERHASILAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMK NEGERI SEKECAMATAN KAYUAGUNG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan pada latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya dukungan dari pihak-pihak yang selalu berkepentingan (*stakeholders*), seperti masyarakat, dan serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Lembaga pendidikan di setiap lingkungan sekolah yang seharusnya mampu mendorong sekolah-sekolah untuk melakukan pembaharuan, juga masih terkesan belum pernah memiliki kemampuan untuk melakukan pembaharuan, suatu lembaga pendidikan masih terkesan melangsungkan budaya yang sudah ada dan berjalan, sehingga sekolah juga tidak akan mampu melakukan pembaharuan dibidang pendidikan.
3. Proses pendidikan yang mestinya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, juga belum berjalan sebagaimana mestinya.
4. Pelayanan pendidikan yang harusnya dapat mengembangkan potensi anak secara maksimal dengan memperhatikan perbedaan individu siswa, juga belum bisa terlaksana dengan baik.
5. Lingkungan sekolah yang mestinya memberikan dukungan kepada sekolah dalam mencapai visi, misi, tujuan sekolah, dan sasaran yang ingin dicapai juga belum berfungsi sebagaimana mestinya, hal ini dimungkinkan tidak semua orang yang ada disekitar sekolah, baik itu warga masyarakat, pemerintah desa, maupun orang tua siswa dapat mengerti dan memahami dunia pendidikan apalagi memahami tentang apa itu visi, misi, dan tujuan sekolah.

6. Potensi sumber daya sekolah (kepala sekolah, guru, dan staff sekolah) dan masyarakat yang mestinya mendukung tercapainya target yang di tetapkan juga belum sepenuhnya bisa melaksanakan.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian tersebut fokus dan dapat diukur dengan jelas. Berikut adalah beberapa pembatasan masalah yang relevan:

1. Penelitian ini hanya akan dilakukan di sekolah-sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Kayuagung. Pembatasan ini penting untuk menghindari generalisasi yang berlebihan dan memastikan data yang dikumpulkan relevan dengan konteks setempat.
2. Penelitian ini akan membatasi variabel yang diteliti pada dua aspek utama: kepemimpinan kepala sekolah dan penerapan manajemen berbasis sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah selalu akan dievaluasi berdasarkan setiap gaya kepemimpinan, kompetensi setiap manajerial, dan kemampuan komunikasi. Sementara itu, penerapan manajemen berbasis sekolah akan diukur melalui indikator-indikator seperti partisipasi stakeholder (guru, siswa, dan orang tua), transparansi dalam pengambilan keputusan, dan efektivitas program-program sekolah.

3. Penelitian ini akan dibatasi pada periode satu tahun akademik, yaitu dari Bulan Juli 2024 hingga September 2024. Pembatasan waktu ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan kondisi yang aktual dan relevan. Perubahan yang mungkin terjadi di luar periode tersebut tidak akan termasuk dalam analisis penelitian ini. Dengan menetapkan pembatasan masalah ini, diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan lebih fokus, terukur, dan dapat menghasilkan temuan yang lebih relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap keberhasilan manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri Sekecamatan Kayuagung?
2. Apakah peran komite sekolah berpengaruh terhadap keberhasilan manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri Sekecamatan Kayuagung?
3. Apakah kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah secara bersama-sama berpengaruh terhadap keberhasilan manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri Sekecamatan Kayuagung?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri Sekecamatan Kayuagung.
2. Untuk dapat mengetahui peran komite sekolah terhadap manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri Sekecamatan Kayuagung.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri Sekecamatan Kayuagung.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Sekolah Sebagai bahan masukan dan evaluasi terhadap pengembangan kualitas fungsi manajerial dan kepemimpinan Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan penjaminan mutu sekolah.
2. Bagi Masyarakat
Memberikan otonomi yang lebih besar, fleksibilitas/keluwesan pada sekolah, serta mendorong partisipasi masyarakat agar mampu meningkatkan peran mereka dalam meningkatkan mutu sekolah.
4. Bagi Peneliti
Sebagai bahan pengetahuan, memperluas wawasan dan menambah pengalaman dengan menerapkan teori-teori yang telah diterima selama kuliah, khususnya mengenai pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap keberhasilan manajemen berbasis sekolah.